

Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)

E-ISSN: 2722-872X

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Magelang

ANALYSIS OF THE EFFECT OF LOCAL OWN INCOME AND REVENUE SHARING FUNDS ON POVERTY LEVELS IN MAGELANG CITY

Anti Nur Izzati ^{1✉}, Lucia Rita Indrawati²

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

✉ antinizzati28@gmail.com

Abstrak

Kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk kebutuhan akan sandang, papan dan pangan. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh rendahnya jumlah pendapatan yang diperoleh individu tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap tingkat kemiskinan di Kota Magelang selama tahun 2010 hingga 2019. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PAD dan DBH secara simultan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Kota Magelang selama sepuluh tahun terakhir. Variabel PAD memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Magelang. Artinya, jika PAD meningkat maka tingkat kemiskinan akan menurun. Sementara variabel DBH memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan. Artinya, apabila DBH meningkat, maka tingkat kemiskinan juga akan meningkat.

Kata kunci: *Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Bagi Hasil (DBH); Tingkat Kemiskinan*

Abstract

Poverty is a condition of someone who has difficulty meeting their needs, including the need for clothing, shelter and food. This condition is usually caused by the low amount of income earned by the individual. This study aims to analyze how the influence of PAD and DBH on poverty levels in Magelang city from 2010 to 2019. The analysis technique used is multiple regression analysis. The results showed that the PAD and DBH variables simultaneously had a positive effect on poverty levels in Magelang City over the past ten years. PAD variable has a negative and significant effect on poverty levels in Magelang city. That is, if PAD increases, the poverty level will decrease. While the DBH variable has a positive but not significant effect on the poverty variable. That is, if the revenue sharing funds increase, the poverty level will also increase.

Keywords: *Regional Original Income (PAD); Profit Sharing Fund (DBH); Poverty level*

PENDAHULUAN

Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi seseorang yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, termasuk kebutuhan akan sandang, papan dan pangan. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh rendahnya jumlah pendapatan yang diperoleh individu tersebut. Menurut Soleh (2015), kemiskinan menjadi permasalahan bangsa yang mendesak sehingga diperlukan berbagai macam langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat, serta untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak agar kehidupan yang bermartabat dapat terwujud. Semakin tinggi tingkat kemiskinan di suatu daerah artinya semakin rendah pertumbuhan ekonomi, akibatnya kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut juga akan semakin rendah. Munculnya kemiskinan juga dapat disebabkan oleh faktor lain seperti kemampuan mengakses lapangan kerja yang rendah serta sedikitnya peluang untuk mendapatkan kesempatan kerja bagi masyarakat (Setiyawati dan Hamzah, 2007). Sehingga, masalah kemiskinan ini, terutama di dalam suatu daerah perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki pengetahuan lebih dalam mengenai kondisi wilayahnya dibandingkan pemerintah pusat, diharapkan mampu menerapkan berbagai kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan di daerahnya masing-masing. Faktor-faktor penyebab kemiskinan atau determinan kemiskinan perlu diperhatikan terlebih dahulu sebelum menelaah kebijakan pemerintah daerah yang akan diterapkan dalam rangka penanggulangan kemiskinan (Jolianis, 2016). Kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah daerah salah satunya yaitu dengan

mengalokasikan pendapatannya untuk melakukan berbagai macam pembiayaan dalam program pengentasan kemiskinan. Pendapatan pemerintah daerah tersebut dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai kegiatannya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah merupakan sumber pendapatan yang dikelompokkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain dari pendapatan asli daerah, pemerintah daerah juga dapat mengentaskan kemiskinan menggunakan dana perimbangan yang dimiliki. Dana Perimbangan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerahnya dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan dibagi menjadi tiga sumber yakni Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan pajak dan bukan pajak seperti sumber daya alam merupakan kelompok Dana Bagi Hasil (DBH). Sumber Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerahnya dalam pelaksanaan desentralisasi. Sementara, pendapatan APBN yang dialokasikan guna pemerataan kapabilitas keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerahnya masing-masing disebut Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan, sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dari pendapatan APBN yang di distribusikan untuk membantu

pendanaan pemerintah daerah. Dana ini digunakan dalam kegiatan khusus yang menjadi urusan masing-masing daerah dan yang sesuai dengan preferensi nasional. Dalam penelitian ini hanya akan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap tingkat kemiskinan di Kota Magelang selama tahun 2010 hingga 2019. Perkembangan angka kemiskinan, pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Kota Magelang periode 2010-2019 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Perkembangan PAD, DBH dan Tingkat Kemiskinan Kota Magelang Tahun 2010-2019.

Tahun	Kemiskinan (%)	PAD (rupiah)	DBH (rupiah)
2010	10.5	59.548.102.100	23.223.352.888
2011	11.06	63.557.701.976	23.333.614.361
2012	10.31	91.314.601.697	28.736.086.711
2013	9.8	107.739.838.961	24.609.560.290
2014	9.14	164.906.266.142	20.207.973.171
2015	9.05	186.677.410.081	118.772.034.465
2016	8.79	220.315.848.702	30.333.059.082
2017	8.75	233.557.714.356	26.685.769.289
2018	7.87	249.873.268.826	464.464.338.444
2019	7.46	273.430.616.133	19.159.017.863

Sumber: BPS, Kota Magelang Dalam Angka (2011-2020)

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan di Kota Magelang selama tahun 2010 hingga 2019 cenderung mengalami tren yang menurun. Namun, di tahun 2011 angka kemiskinan di kota Magelang sempat mengalami kenaikan mencapai 0,56 persen yaitu dari 10,50 persen menjadi 11,06 persen. Setelah periode tersebut, tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan hingga menjadi 7,6 persen pada tahun 2019. Sehingga dapat dikatakan bahwa selama tahun 2010 hingga 2019, pemerintah Kota Magelang telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan di wilayahnya.

Pendapatan daerah Kota Magelang yang diwakilkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Tabel 1

menunjukkan peningkatan yang positif. Terlihat bahwa di tahun 2010 PAD Kota Magelang hanya sebesar Rp. 59.548.102.100,-. Sementara selama sembilan tahun berikutnya Kota Magelang mampu meningkatkan pendapatannya hingga mencapai Rp. 273.430.616.133,- pada tahun 2019.

Selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumber penerimaan daerah juga berasal dari dana perimbangan yang dalam penelitian ini hanya menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pajak dan bukan pajak. Berdasarkan data pada Tabel 1 terlihat bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) Kota Magelang selama tahun 2010-2019 tergolong fluktuatif. Pada tahun 2010, jumlah DBH sebesar Rp. 23.223.352.888,- yang selanjutnya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 28.736.086.711,-. Sementara di tahun 2013, 2014, 2016, 2017 dan 2019 Dana Bagi Hasil Kota Magelang terus mengalami penurunan hingga menjadi Rp. 19.159.017.863,- di tahun 2019.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Manek dan Badrudin (2016) dikatakan bahwa PAD mempunyai pengaruh yang signifikan negatif terhadap kemiskinan. Hal ini menginformasikan bahwa kenaikan jumlah PAD dapat mengentaskan kemiskinan absolut bagi kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara, Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang tidak signifikan negatif terhadap kemiskinan. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa keuangan daerah belum dikelola secara ideal serta penganggaran daerah belum diprioritaskan bagi masyarakat dan kapasitas institusi lokal. Hasil serupa juga terjadi pada penelitian yang telah dilakukan oleh Rasu, Anderson dan Rosalina (2019) yang menyatakan bahwa PAD mempunyai pengaruh negatif dan signifikan bagi tingkat kemiskinan di suatu daerah. Pernyataan ini berarti bahwa apabila PAD meningkat maka akan mengakibatkan penurunan pada tingkat

kemiskinan. Sementara, Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di suatu daerah. Hasil ini dapat diartikan bahwa jika dana bagi hasil meningkat, maka akan menyebabkan penurunan angka kemiskinan.

Adanya pengelolaan dana PAD dan dana perimbangan untuk mengentaskan kemiskinan akan meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) yang meliputi indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak. Pengelolaan dana Pendapatan Asli Daerah serta dana perimbangan secara maksimal dan tepat dapat membawa dampak yang positif dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) (Firmansyah dkk., 2015)

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap tingkat kemiskinan di Kota Magelang selama tahun 2010 hingga 2019 menggunakan teknik analisis regresi berganda.

LANDASAN TEORI

Kemiskinan

Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Kuncoro, 1997). Kemiskinan merupakan sebuah kondisi dimana seseorang berada dalam kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang disebabkan oleh beberapa faktor penyebab, baik yang berasal dari diri secara pribadi maupun karena lingkungan.

Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan

pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (*inter region income gap*) (Harahap, 2006).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh suatu daerah dari sumber potensi dalam daerah tersebut yang diatur berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 79 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rasu, Anderson dan Rosalina (2019) menyatakan bahwa PAD mempunyai pengaruh negatif dan signifikan bagi tingkat kemiskinan di suatu daerah. Pernyataan ini berarti bahwa apabila PAD meningkat maka akan mengakibatkan penurunan pada tingkat kemiskinan.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut PP No. 55 Tahun 2005 Pasal 5 ayat (2), besaran dana bagi hasil adalah sebagai berikut: Besaran dana bagi hasil penerimaan Negara dari PBB dengan imbalan 10% untuk daerah. Besaran dana bagi hasil penerimaan Negara dari BPHTB dengan imbalan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah. Dana bagi Hasil pajak penghasilan pasal 25/29 dan 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20%. Sementara itu, dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam ditetapkan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni data yang berasal dari data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Magelang. Penelitian ini menggunakan data *time series* dari tahun 2010 hingga tahun 2019.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian dibagi menjadi dua yakni variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau variabel independen, variabel stimulus, *predictor*, dan *antecedent* merupakan variabel yang mempengaruhi berubah atau munculnya variabel dependen. Sedangkan variabel terikat yang biasa disebut dengan variabel dependen atau variabel output adalah variabel yang dipengaruhi oleh adanya variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan di Kota Magelang tahun 2010-2019 dalam bentuk prosentase (%). Sementara, variabel terikat dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Kota Magelang tahun 2010-2019 dalam satuan ribu rupiah.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu data tingkat kemiskinan di Kota Magelang beserta data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang ada di Kota Magelang. Selanjutnya dilakukan penarikan sampel mengingat jumlah populasi yang terlalu besar. Dari semua populasi tersebut, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah data tingkat kemiskinan, PAD dan DBH Kota Magelang selama tahun 2010 hingga 2019.

Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan metode sumber data sekunder. Data tingkat kemiskinan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Magelang beserta publikasi yang berjudul Magelang Dalam Angka tahun 2011 hingga tahun 2020.

Metode Analisis Data

Penelitian untuk menganalisis pengaruh PAD dan DBH terhadap tingkat Kemiskinan di Kota Magelang ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kuantitatif berupa metode regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan program *Microsoft Excel 2013* dan *Eviews 10* untuk melakukan pengolahan data.

Analisis Regresi Berganda

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik regresi linear berganda untuk mendeteksi pengaruh dari variabel independen (PAD dan DBH) terhadap variabel dependen (Kemiskinan) di Kota Magelang periode 2010-2019. Model persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana:

Y	:	Kemiskinan
X_1	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
X_2	:	Dana Bagi Hasil (DBH)
β_0	:	Konstanta
β_1, β_2	:	Koefisien Regresi Linear Berganda
e	:	Standar error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu sebelum dilakukan pengujian regresi linear berganda. Terdapat tiga jenis pengujian asumsi klasik yaitu uji Heteroskedastisitas, uji Autokorelasi dan uji Multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat ada tidaknya variansi dalam data. Dikatakan terjadi

heteroskedastisitas dalam data apabila nilai probabilitas dari *Obs*R-squared* kurang dari 5% atau 0,05.

Hasil pengujian Heteroskedastisitas pada penelitian ini dengan menggunakan uji *White Test* pada data PAD, DBH dan tingkat kemiskinan di Kota Magelang periode 2010-2019 menunjukkan nilai *Obs*R-squared* sebesar 2,94 dengan probabilitas *Chi-square* sebesar 0,229. Dengan nilai *Obs*R-squared* yang lebih dari alfa 5% atau $2,94 > 0,05$ artinya kita dapat menerima H_0 dan menolak H_1 . Sehingga dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan data saat ini dengan data sebelumnya jika datanya *time series*. Suatu data dikatakan terjadi autokorelasi apabila nilai probabilitas *Obs*R-squared* yang dimiliki kurang dari 5% atau 0,05.

Hasil uji Autokorelasi menggunakan uji *Lagrange Multiplier* pada penelitian ini diperoleh hasil nilai *Obs*R-squared* sebesar 3,035813. Nilai probabilitas *Chi-Squared* (2) yang merupakan nilai *p-value* uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* menunjukkan nilai sebesar 0,2192 atau 21,92% dimana nilai ini lebih besar dari alfa 5% atau 0,05. Sehingga, H_0 diterima yang berarti bahwa pada data yang diuji tidak ada masalah autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk melihat ada tidaknya penggunaan yang berulang dari salah satu variabel. Terdapat tiga kriteria untuk menunjukkan ada tidaknya multikolinearitas dalam suatu data. *Pertama*, suatu data dikatakan terjadi multikolinearitas apabila nilai *Centered VIF* pada masing-masing variabel bernilai kecil atau kurang dari sepuluh. *Kedua*, data penelitian dikatakan

terjadi multikolinearitas apabila nilai *R-squared* dari hasil uji regresi mendekati 1 (pada rentang 0,95-0,99). *Ketiga*, suatu data penelitian dikatakan terjadi multikolinearitas apabila nilai *covariance*-nya kecil. Nilai *covariance* besar jika berada pada rentang angka 0,7 hingga 1. Nilai *covariance* sedang jika berada pada rentang angka 0,4 hingga 0,7. Nilai *covariance* kecil jika berada pada rentang angka 0 hingga 0,4.

Hasil pengujian Multikolinearitas menggunakan uji *variance inflation factors* pada data PAD, DBH dan tingkat kemiskinan di Kota Magelang tahun 2010-2019 menghasilkan nilai *Centered VIF* pada kedua variabel (PAD dan DBH) kurang dari 10. Dengan alasan ini, maka dapat dikatakan bahwa dalam model pengujian pengaruh antara PAD dan DBH terhadap tingkat kemiskinan di Kota Magelang tahun 2010-2019 tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Pengujian Regresi Linear Berganda Koefisien Determinan (R^2)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat prosentase keberpengaruhan antara variabel independen (PAD/ X_1 dan DBH/ X_2) terhadap variabel dependen (Kemiskinan/ Y). Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda, diketahui nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,870552 yang berarti bahwa variabel PAD (X_1) dan DBH (X_2) dapat mempengaruhi variabel kemiskinan (Y) sebesar 87,05% dan sisanya sebesar 12,95% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Uji Simultan (Uji F)

Dengan nilai *F-statistik* sebesar 17,81270 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,021646 maka signifikan pada alfa 5%. Sehingga dapat dikatakan bahwa model ini telah memenuhi uji kelayakan model (*goodness of fit*). Artinya, variabel PAD (X_1) dan DBH (X_2) secara simultan dapat mempengaruhi atau berpengaruh positif terhadap variabel kemiskinan (Y).

Uji Signifikan (Uji T)

Hasil estimasi PAD (X_1) pada hasil pengujian regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel PAD (X_1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Kemiskinan (Y). Dengan nilai signifikansi sebesar 0.0162 yang lebih kecil dari nilai $\alpha = 10\%$ atau $0.0162 < 0.10$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Variabel PAD (X_1) mempunyai t_{hitung} sebesar 4.902002 dengan t_{tabel} sebesar 1.397. Dikarenakan $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka dapat dikatakan bahwa variabel PAD (X_1) memiliki kontribusi terhadap variabel Kemiskinan (Y).

Nilai t negatif menunjukkan bahwa variabel PAD (X_1) mempunyai hubungan yang tidak searah dengan variabel Kemiskinan (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan. Hal ini berarti bahwa apabila pendapatan asli daerah meningkat maka tingkat kemiskinan akan menurun. Sebaliknya, apabila pendapatan asli daerah menurun maka tingkat kemiskinan akan meningkat. Hasil ini memiliki kesamaan dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh Dewi I dkk., (2019) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan melalui Belanja Daerah. Kenaikan PAD akan mengakibatkan turunnya tingkat Kemiskinan melalui Belanja Daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap penurunan tingkat kemiskinan, Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi pada Belanja Daerah terhadap Kemiskinan.

Hasil estimasi DBH (X_2) pada hasil pengujian regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel DBH (X_2) berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap variabel Kemiskinan (Y). Nilai signifikansi sebesar 0.5178 lebih besar dari nilai $\alpha = 10\%$ atau $0.5178 > 0.10$, maka H_1

ditolak dan H_0 diterima. Variabel DBH (X_2) mempunyai t_{hitung} sebesar 0.730785 dengan t_{tabel} sebesar 1.397. Dikarenakan $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel DBH (X_2) tidak memiliki kontribusi terhadap variabel Kemiskinan (Y).

Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel DBH (X_2) mempunyai hubungan yang searah dengan variabel Kemiskinan (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan. Hal ini berarti apabila dana bagi hasil meningkat, maka tingkat kemiskinan juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila dana bagi hasil menurun maka tingkat kemiskinan juga akan mengalami penurunan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pengujian Koefisien Determinan (R^2) diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dapat mempengaruhi variabel kemiskinan sebesar 87,05% dan sisanya sebesar 12,95% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Dari hasil pengujian simultans (uji T) diketahui variabel PAD dan DBH secara simultan dapat berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Kota Magelang tahun 2010 hingga 2019. Hasil uji signifikan (uji T) menyatakan bahwa variabel PAD memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Magelang. Artinya, apabila pendapatan asli daerah meningkat maka tingkat kemiskinan akan menurun. Sebaliknya, jika pendapatan asli daerah menurun maka tingkat kemiskinan akan meningkat. Sementara variabel DBH mempunyai pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan. Artinya, apabila dana bagi hasil meningkat, maka tingkat

kemiskinan juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila dana bagi hasil menurun maka tingkat kemiskinan juga akan mengalami penurunan.

Saran

Saran yang dapat diberikan dari artikel penelitian ini yaitu alangkah lebih baik jika pemerintah Kota Magelang dapat mengolah potensi-potensi yang ada di Kota Magelang secara lebih optimal untuk menunjang pendapatan asli daerah. Dengan pendapatan daerah yang tinggi, maka dapat dialokasikan untuk membiayai program-program yang dapat bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Magelang. Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah Kota Magelang dengan masyarakatnya untuk melaksanakan program-program serta kebijakan yang telah dibuat menjadi salah satu kunci keberhasilan bersama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan.

Implikasi dan Keterbatasan

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber penerimaan daerah yang seharusnya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan dua variabel bebas yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan berupa Dana Bagi Hasil (DBH) yang berasal dari pajak dan bukan pajak.

Diharapkan agar penelitian-penelitian selanjutnya dapat menggunakan lebih banyak variabel bebas untuk menganalisis data yang lebih detail mengenai tingkat kemiskinan di suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BPS Kota Magelang. (2020). *Kota Magelang Dalam Angka 2020*.
Dewi I, S. P., Koleangan, R. A. M., dan Engka,

D. S. M. (2019). Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Kemiskinan melalui Belanja Daerah di Kota Bitung. *Hilos Tensados*, 1, 1-476.

Firmansyah, A. K., Wibisono, S., dan Suswandi, P. E. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*.

Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Harahap, S. S. (2006). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jolianis. (2016). Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening. *Economica*, 4(2), 193-216.

Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP-AMP-YKPN.

Manek, M., dan Badrudin, R. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Telaah Bisnis Volume 17, Nomor 2, 18(1)*, 19-32.

Rasu, K. J. ., Kumenaung, A. G., dan Koleangan, R. A. . (2019). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(2), 1.

Setiyawati, A., dan Hamzah, A. (2007). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211-228.

Soleh, A. (2015). Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 197-209.